



PERUBAHAN RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)
2024 – 2026

(Sesuai Kepmen No.900.1.15.5-1317 Ta 2023)

**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai Dinas Teknis yang berada di Kabupaten, berperan dalam penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023., maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, yang merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu tiga tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tiga tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan. Dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Semoga penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan , Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	48
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
Tabel T.C.25 .Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	54
Tabel T.C. 27	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
Tabel TC. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada	
tujuan dan sasaran RPD.....	77
BAB VIII PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program yang dituangkan ke dalam strategi dan arah kebijakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RENSTRA ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). RENJA Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan yang memuat kebijakan program kegiatan pembangunan, rencana kerja, kerangka pendanaan dan indikator kinerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Terbitnya Inmendagri 52 Tahun 2022 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir maka tahun perencanaan 2024 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Menindaklanjuti tidak adanya platform politik dalam dokumen RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagai cita-cita pembangunan, RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 mengacu terhadap RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 membagi menjadi 4 periode tahun perencanaan jangka menengah. Periode pertama adalah tahun 2005 -2008, periode kedua adalah tahun 2009-2014, periode ketiga ialah tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019, dan terakhir ialah periode tahun 2023-2028. RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan tahapan terakhir perencanaan jangka panjang daerah. Sehingga ruang untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Magetan telah dapat mencapai Visi dan Misi daerah harus tertuang dalam RPD Magetan tahun 2024- 2026. Maka dari itu , Penyususan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 mengacu terhadap RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, mengharuskan Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis karena terdapat Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Fungsi Perubahan Renstra antara lain :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan

2. Menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal dan pertimbangan di atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026;
33. Keputusan Bupati Magetan No. 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Dinas Komunikasi dan Informatika, lintas satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan dasar penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang.
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
3. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah serta pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun tiga tahunan yaitu Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
1.2 Landasan Hukum	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal
1.3 Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, hasil telaah terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunga Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Faktor-faktor penghambat atau pun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau pun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
- Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan aset/modal. Adapun Sumber Daya Manusia 31 PNS dan 25 Non PNS, Aset/modal sejumlah 124 item .

Pada periode Renstra Tahun 2019 – 2023 terdapat 4 (empat) Program dan 4 (empat) indikator yang seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yaitu indikator Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik, Cakupan ketersediaan data statistik sektoral dan Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing unsur dalam susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan surat-menurut, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan pelengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat pensiunan;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;

- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTRA);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP); dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan

- kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan TIK, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, Layanan manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi layanan publik, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan Nama *Domain* dan *Sub Domain* bagi lembaga, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK

- Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
- c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan dan pengaturan penggunaan *bandwidth* untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan *teleconference* Pemerintah Daerah;
 - h. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
 - i. Perumusan bahan rumusan norma standar prosedur penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
 - j. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - k. Penyusunan bahan standar pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - l. Penyusunan bahan koordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik;
 - m. Pengelolaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharaannya

- kepada unit pengguna;
- n. Pengembangan integrasi aplikasi sistem informasi elektronik layanan publik;
 - o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1. Seksi Data Statistik

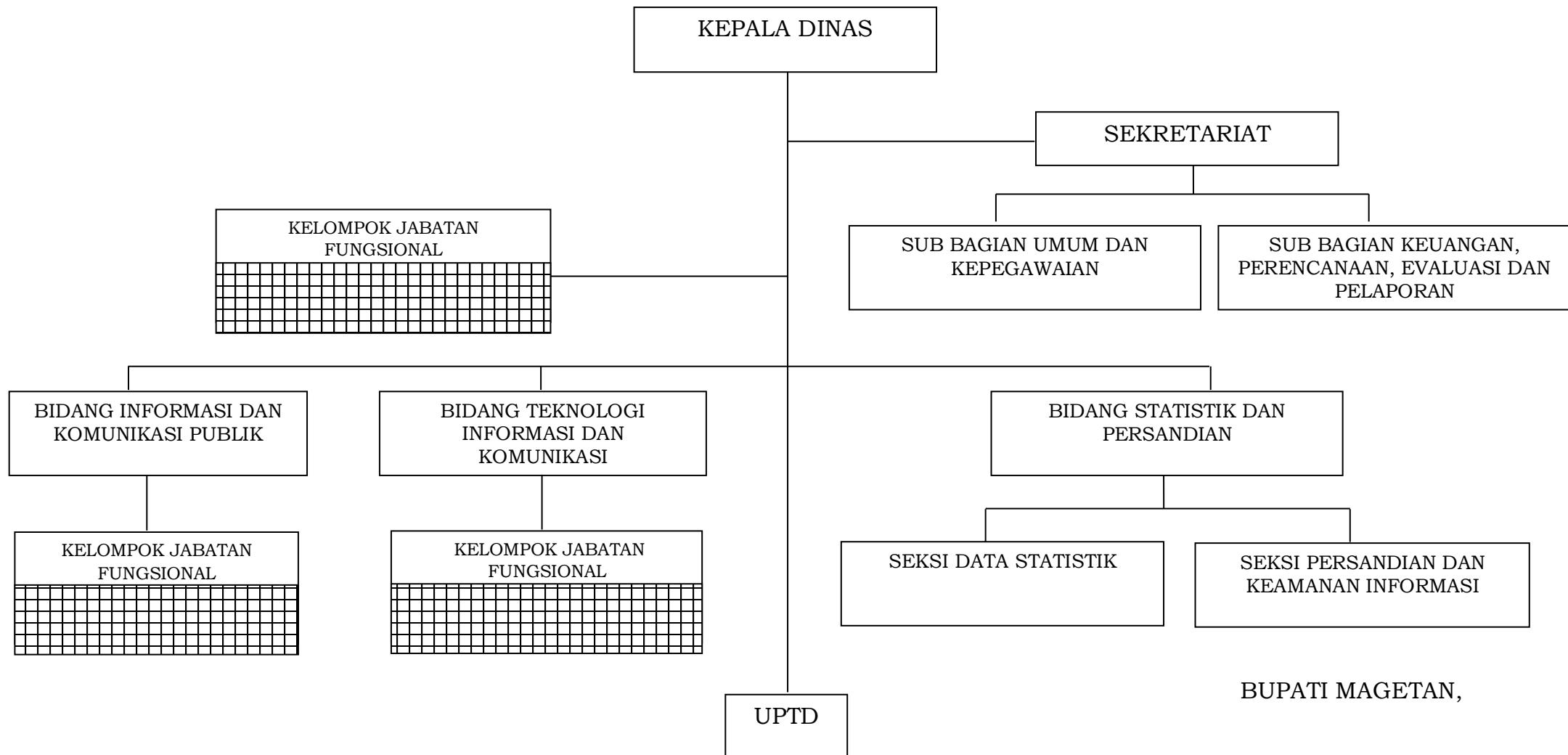
Mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- c. Melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - d. Melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- Mempunyai tugas :
- a. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. Melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. Melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Melakukan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - f. Melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengaman informasi;
 - g. Melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - h. Melakukan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - i. Melakukan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - j. Melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - k. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
 - l. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
6. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
7. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Bupati.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (PNS) Dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Kepala Dinas, Sekretaris
5	Pembina (IV/a)	2	Kabid
6	Panata Tingkat I (III/d)	8	Kabid, Kasi, Kasubag, Fungsional penyetaraan, Pelaksana
7	Penata (III/c)	2	Kasubag, Fungsional penyetaraan, Pelaksana
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	Pelaksana
9	Penata Muda (III/a)	6	Fungsional, Pelaksana
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	Fungsional, Pelaksana
11	Pengatur (II/c)	5	Fungsional, Pelaksana
12	Non PNS	25	
Jumlah =		56	

Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	3
4	Kasubag	IV.a	2
5	Kasi	IV.a	2
6	Fungsional Penyetaraan	-	4
7	Fungsional /pelaksana	-	18
8	Non PNS-	-	25
Jumlah			56

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM III	3	
2.	Diklat PIM IV	4	
Jumlah		7	

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	Strata Dua (S2)	2	-	2
2.	Strata Satu (S1)	17	14	31
3.	Sarjana Muda (D3)	8	1	9
4.	Diploma (D4)	-	-	-
5.	Diploma Satu (D1)	-	2	2
6.	SLTA	4	8	12
7.	SLTP	-	-	-
8.	SD	-	-	-
Jumlah		31	25	56

2.2.2 Aset / Modal

Tabel 5 :

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung oleh asset/modal sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	AC	2	63	LEMARI KACA	1
2	AC SPLIT 2 PK	2	64	LEMARI KAYU	2
3	AC UNIT	16	65	LEMARI KAYU	1
4	ALAT PEMADAM / PORTABLE	1	66	LENSA KAMERA	1
5	ALMARI MOBILFILE	1	67	LENSA KAMERA	1
6	AMPLIFIER	1	68	LOUDSPEAKER	2
7	ANTENA ACVSES POINT / WIFI	10	69	MEGAPHONE	2
8	ANTENA VHF / FM STATIONARY	1	70	MEJA KAYU/ ROTAN	21
9	AUDIO COMPRESOR	1	71	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	17
10	AUDIO FILTER	1	72	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1
11	AUDIO TAPE REEL RECORDER	1	73	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	7
12	BACKDROP	1	74	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	8
13	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI PERMANEN	1	75	MEJA KOMPUTER	2
14	BRANKAS	1	76	MEJA RAPAT	9
15	CALIBRATION EXITER	1	77	MEJA TULIS	8

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	No.	NAMA BARANG	JUMLAH
16	CAMERA + ATTACHMENT	2	78	MICROPHONE	1
17	CAMERA DIGITAL	7	79	MICROSCOPE	5
18	CAMERA ELECTONIC	1	80	NOTE BOOK	3
19	CAMERA VIDEO	1	81	OTDR MINI	1
20	CAMERA VIDEO PROFESIONAL	1	82	OUTDORR ACCESS POINT	10
21	CHARGER BATTERY CAMERA	2	83	PAPAN NAMA INSTANSI	1
22	COMPRESOR	1	84	PAPAN TULIS	1
23	DRONE CAMERA	1	85	PAPER SHEETER	1
24	EQUALIZER	2	86	PC	1
25	FACSIMILE	1	87	PC UNIT	39
26	FILLING BESI/ METAL	3	88	PESAWAT TELEPHONE	1
27	FINGER PRINT	1	89	POWER AMPLIFIER	1
28	FULL BODY HARMES	1	90	POWER MIXER EMX SONY C	1
29	FUSION SPLICER	1	91	PRINTER	104
30	GENSET	1	92	PRINTER	1
31	HAND PHONE	3	93	PRINTER A3	1
32	HANDY CAM	1	94	RADIO	2
33	HANDY TALKY (HT)	2	95	RAK BESI/METAL	10
34	HANDYCAM	1	96	RECEIVER STL VHF (FM)	1
35	HDMI SPLINTER	1	97	ROUTER	55
36	HEADPHONE	4	98	SCANNER	1
37	HELMET	10	99	SD CARD	1
38	HUB	6	100	SEPEDA MOTOR	10
39	JARINGAN CCTV	3	101	SERVER	1
40	JARINGAN KOMPUTER	1	102	SMARTPOST	78
41	KABEL UTP CAT 6	5	103	SOFA	1
42	KIPAS ANGIN	2	104	SOUNCARD AUDIO USB	2
43	KOMPUTER SERVER	1	105	SOUND SYSTEM	1
44	KURSI BESI / METAL	1	106	SPEAKER	2
45	KURSI BIASA	28	107	SSD SATA 1 TB	1
46	KURSI KAYU/ ROTAN/ BAMBU	8	108	STATION WAGON	5
47	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	9	109	STAVOLT 600 VA	1
48	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1	110	TELEPHONE HYBRID	1
49	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	3	111	TELEPON HYBRID	1
50	KURSI LIPAT	3	112	TELEVISI	3
51	KURSI PUTAR	1	113	TENDA KERUCUT 3 X 3 M	1
52	KURSI RAPAT	62	114	TIANG LISTRIK	237
53	KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT STAF	5	115	TRIPOD	1
54	KURSI TAMU	3	116	TRIPOD CAMERA	1
55	LAP TOP	220	117	TRIPOD TELEPROMTER	1
56	LAPTOP	18	118	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY	2
57	LAYAR PROYEKTOR	1	119	UNIT PEMANCAR MF/MW TRANSPORTABLE	1
58	LCD PROYEKTOR	3	120	UNIT PEMANCAR SHF TRANSPORTABLE	1
59	LED MONITOR	1	121	UNIT POWER SUPPLY	1
60	LEMARI ARSIP UNTUK RAPAT DINAMIS	8	122	WHITE BOARD ELEKTRONIK	1
61	LEMARI BESI/ METAL	1	123	WIRELESS ACCESS POINT	6
62	LEMARI ES	1	124	ZICE	2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan meliputi :

a. Penerapan Tata kelola TIK

Diantaranya meliputi layanan fasilitasi pengadaan atau pembuatan aplikasi bagi OPD, fasilitasi ini dilaksanakan berdasarkan SOP yang ada.

b. Fasilitasi Colocation dan Hosting

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Kabupaten Magetan dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

c. Keamanan Informasi

Dimaksudkan agar OPD Kabupaten Magetan menerapkan keamanan informasi dengan berdasar pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

d. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik.

e. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi terkait potensi wilayah.

f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Yang dimaksudkan sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

g. Layanan Pengaduan Wani Bares

Merupakan layanan pengaduan untuk masyarakat terkait pelayanan publik Pemerintah Daerah yang berbasis teknologi aplikasi WhatsApp dengan nomor 081-231-177-772.

h. Publikasi

Dimaksudkan sebagai kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait program prioritas dan kegiatan Pemerintah Daerah.

i. Fasilitasi Pelatihan di Bidang TIK dan Smart City

Merupakan layanan fasilitasi pelatihan teknis kepada OPD atau masyarakat, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peserta pelatihan di bidang TIK dan Smart City.

j. Media Online

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.kominfo.magetan.go.id

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didasarkan pada sasaran/target Perubahan Renstra periode sebelumnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari Tabel T-C.23, sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ditampilkan pada tabel T-C.24.

Tabel T-C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	<i>Komunikasi dan informatika</i>																		
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	2,0	2,2	2,4	2,8	3,0	2,56	2,86	2,56	2,27	-	128,00 %	130,00 %	106,67%	81,07%	-
	Persentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan	-	-	-	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	36,36	92,73	123,64	123,64	-	91,00%	185,00 %	206,00%	203,00%	-
	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	-	-	10,00	40,00	70,00	80,00	90,00	19,31	100,00	100,00	100,00	-	193,00 %	250,00 %	143,00%	125,00%	-
	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	-	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	88,89	66,67	77,78	88,89	-	137,00 %	95,00%	104,00%	111,00%	-
B.	<i>Urusan Statistik</i>																		
	Persentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	-	-	-	60,00	70,00	80,00	82,00	85,00	45,45	49,09	77,78	85,19	-	76,00%	70,00%	97,00%	104,00%	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C.	<i>Urusan Persandian</i>																		
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	-	-	-	0	0	15,00	18,00	21,00	9,09	10,09	16,36	27,78	-	-	-	109,00%	154,00%	-

Berdasarkan tabel T-C.23, Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan terbagi dalam tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah sebelumnya menunjukkan bahwa ada sebagian indikator belum tercapai secara maksimal pada periode Renstra tahun 2019 s.d 2022. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada tahun 2019 s.d 2022 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel a.1
Kinerja urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	na	19,31	100,00	100,00	100,00
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks (angka)	1,82	2,56	2,86	2,56	2,27
3.	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	na	88,89	66,67	77,78	88,89

1. Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya pelayanan berbasis teknologi adalah sebagai inovasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan, selain itu penggunaan teknologi dapat meringankan beban anggaran, biaya perawatan perlengkapan yang tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan belanja perlengkapan ATK utamanya bahan pakai cepat habis. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pengembangan e government mengalami fluktuasi dengan perbandingan realisasi yang tidak terlalu tinggi, data mengalami kenaikan yang cukup signifikan salah satu aspek pendorongnya adalah pandemi covid 19 dimana pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam mengurangi penyebaran virus memaksa kita untuk terbiasa dalam menggunakan teknologi. Berbagai aturan serta dan prosedur baru di terbitkan sebagai langkah perubahan dalam pengembangan e-governtment dalam pelayanan pemerintah.
2. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun data diatas menunjukkan adanya trend meningkat meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,3. Penurunan tersebut disebabkan karena bertambahnya indikator indeks SPBE dari 35 indikator menjadi 45 indikator. Dengan adanya penurunan tersebut

maka pemerintah harus dapat mengevaluasi serta berfokus terhadap perbaikan dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan trend data 5 tahun kebelakang maka diproyeksikan pada tahun 2023 indeks SPBE akan meningkat hingga mencapai angka 3.

3. Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik di ukur dengan jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola dibagi jumlah media informasi. Jumlah media informasi diantaranya adalah media cetak, radio, televisi, online, pertura, media tatap muka, media luar ruang, rekam, dan media sosial. Adapun dari data diatas, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun ke belakang cakupan layanan informasi dan komunikasi publik mengalami kenaikan. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah media komunikasi informasi public yang dipantau.

b. Bidang Statistik

Capaian Kinerja urusan Bidang Statistik Pada tahun 2019 s.d 2022 dapat dilihat pada indikator sebagai berikut :

Tabel b.1
Bidang Statistik

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Sektoral	%	na	45,45	49,09	77,78	85,19

Capaian ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di Kabupaten Magetan menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat di angka 45,45% kemudian terus naik hingga mencapai 85,19% di tahun 2022. Capaian ini telah memenuhi target RKPD tahun 2022. Hal ini dikarenakan meningkatnya OPD yang sudah mengintregasikan Data Statistik Sektoral.

c. Bidang Persandian

Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi merupakan ukuran atau nilai yang menggambarkan kesiapan, kelengkapan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan regulasi, kebijakan, standar dan prosedur pengamanan informasi. Berikut penyajian data dari indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi :

Tabel d.1
Bidang Persandian

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	%	na	9,09	10,09	16,36	27,78

Indikator persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi pada tahun 2018 mengalami kekosongan data. Tahun 2019 capaian indikator ini adalah 9,09% meningkat mencapai 10,09% di tahun 2020, selanjutnya tahun 2022 kembali meningkat dengan capaian 27,78%. Hal ini dikarenakan meningkatnya OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata – Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520.000.000	485.953.783	-	-	493.068.159	446.453.116	-	-	94,82 %	91,87 %	0,00%	-	-6,55%	-9,45%
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.000.000	355.953.783			284.502.137	327.857.827	-	-	96,12 %	92,11 %		-	20,25%	15,24%
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	204.000.000	110.000.000			189.323.022	99.515.289	-	-	92,81 %	90,47 %		-	-46,08%	-47,44%
Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	20.000.000			19.243.000	19.080.000	-	-	96,22 %	95,40 %		-	0,00%	-0,85%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	518.223.750	531.964.920	-	-	503.261.258	512.527.363	-	-	97,11 %	96,35 %	0,00%	-	2,65%	1,84%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000	70.000.000			70.029.708	58.352.993	-	-	87,54 %	83,36 %		-	-12,50%	-16,67%
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	184.000.000	185.000.000			180.428.500	181.040.700	-	-	98,06 %	97,86 %		-	0,54%	0,34%
Pengadaan Perlengkapan Kantor	239.223.750	256.964.920			238.613.050	253.283.670	-	-	99,74 %	98,57 %		-	7,42%	6,15%
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000	20.000.000			14.190.000	19.850.000	-	-	94,60 %	99,25 %		-	33,33%	39,89%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	25.000.000	-	-	19.155.800	24.727.475	-	-	95,78 %	98,91 %	0,00%	-	25,00%	29,09%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000	25.000.000			19.155.800	24.727.475	-	-	95,78 %	98,91 %		-	25,00%	29,09%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.148.955.478	6.401.165.924	-	-	5.148.434.321	5.691.332.092			83,73 %	88,91 %	-	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000	15.500.000	-	-	41.762.500	15.434.700			94,91 %	99,58 %	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	22.000.000	12.650.250	-	-	21.576.000	12.650.200			98,07 %	100,00 %	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.000.000	2.849.750	-	-	20.186.500	2.784.500			91,76 %	97,71 %	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.397.660.950	3.792.122.000	-	-	2.582.405.705	3.503.713.725			76,01 %	92,39 %	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	3.396.660.950	3.791.122.000	-	-	2.581.905.705	3.503.166.725			76,01 %	92,40 %	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	500.000	547.000			50,00 %	54,70 %	-	-
Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	-	-	1.180.000.000	45.400.000	-	-	1.050.982.148	43.873.900			89,07 %	96,64 %	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	1.180.000.000	45.400.000	-	-	1.050.982.148	43.873.900			89,07 %	96,64 %	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	296.189.670	1.070.803.624	-	-	275.592.584	719.347.387			93,05 %	67,18 %	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	7.998.925	6.895.000	-	-	7.710.190	6.147.000			96,39 %	89,15 %	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	164.906.375	940.196.224	-	-	149.493.400	589.934.350			90,65 %	62,75 %	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	16.991.570	5.000.000	-	-	15.239.850	4.999.800			89,69 %	100,00 %	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	26.492.800	23.550.000	-	-	26.070.000	23.451.550			98,40 %	99,58 %	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	16.500.000	10.862.400	-	-	16.042.192	10.862.300			97,23 %	100,00 %	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	3.300.000	3.500.000	-	-	3.000.000	3.250.000			90,91 %	92,86 %	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	60.000.000	80.800.000	-	-	58.036.952	80.702.387			96,73 %	99,88 %	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.063.031.658	1.280.640.300	-	-	1.042.021.599	1.253.292.595			98,02 %	97,86 %	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	148.433.408	173.871.800	-	-	135.598.799	152.666.345			91,35 %	87,80 %	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	15.530.000	20.580.000	-	-	15.476.000	20.510.000			99,65 %	99,66 %	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	899.068.250	1.086.188.500	-	-	890.946.800	1.080.116.250			99,10 %	99,44 %	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.073.200	196.700.000	-	-	155.669.785	155.669.785			92,62 %	79,14 %	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	36.640.000	36.900.000	-	-	34.440.685	32.006.551			94,00 %	86,74 %	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	-	-	33.555.000	49.300.000	-	-	28.382.100	45.138.390			84,58 %	91,56 %	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	97.878.200	110.500.000	-	-	92.847.000	109.488.250			94,86 %	99,08 %	-	-
Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	1.900.600.000	-	-	-	1.627.246.612		-	-	85,62 %	-	0,00%	-	-100,00%	-100,00%
Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	585.600.000	-	-	-	332.784.359	-	-	-	56,83 %	-		-	-100,00%	-100,00%
Pengembangan Aplikasi	300.000.000	-	-	-	289.217.253	-	-	-	96,41 %	-		-	-100,00%	-100,00%
Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	1.000.000.000	-	-	-	998.120.000	-	-	-	99,81 %	-		-	-100,00%	-100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	-	-	-	7.125.000	-	-	-	47,50 %	-		-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	115.000.000	297.233.050	-	-	114.486.000	287.148.700	-	-	99,55 %	96,61 %	0,00%	-	158,46%	150,82%
Pengembangan E-Government	115.000.000	-	-	-	114.486.000	-	-	-	99,55 %	-		-	-100,00%	-100,00%
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-			-		-	-	0,00%	-		-	-	-
Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	-	295.000.000			-	284.915.650	-	-	-	96,58 %		-	-	-
Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	-	1.909.650			-	1.909.650	-	-	-	100,00 %		-	-	-
Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	323.400			-	323.400	-	-	-	100,00 %		-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Progam Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informatika	50.000.000	67.000.000	-	-	47.880.837	61.627.550	-	-	95,76 %	91,98 %	0,00%	-	34,00%	28,71%
Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	50.000.000	67.000.000	-	-	47.880.837	61.627.550	-	-	95,76 %	91,98 %	-	-	34,00%	28,71%
Program Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	25.000.000	-	-	-	24.698.000	-	-	-	98,79 %	0,00%	-	-	-
Implementasi Sistem Informasi Desa	-	25.000.000	-	-	-	24.698.000	-	-	-	98,79 %	-	-	-	-
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	2.757.000.000	-	-	-	2.599.094.057	-	-	-	94,27 %	0,00%	-	-	-
Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	1.970.000.000	-	-	-	1.857.046.130	-	-	-	94,27 %	-	-	-	-
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	-	377.000.000	-	-	-	339.950.527	-	-	-	90,17 %	-	-	-	-
Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	-	410.000.000	-	-	-	402.097.400	-	-	-	98,07 %	-	-	-	-
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	-	2.254.855.715	2.149.499.975	-	-	2.159.722.760	2.071.786.986	-	-	95,78 %	96,38 %	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.429.324.800	1.050.229.800	-	-	1.414.194.800	1.045.405.125	-	-	98,94 %	99,54 %	-	-
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	1.429.324.800	1.050.229.800	-	-	1.414.194.800	1.045.405.125	-	-	98,94 %	99,54 %	-	-
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	825.530.915	1.099.270.175	-	-	745.527.960	1.026.381.861	-	-	90,31 %	93,37 %	-	-
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota	-	-	80.970.000	75.166.375	-	-	56.633.160	68.468.140	-	-	69,94 %	91,09 %	-	-
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Dearah	-	-	563.449.615	564.335.000	-	-	533.425.800	555.727.800	-	-	94,67 %	98,47 %	-	-
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	122.060.050	157.100.300	-	-	110.622.750	152.965.238	-	-	90,63 %	97,37 %	-	-
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	-		65.000.000	-	-		41.933.100	-	-		64,51 %	-	-
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-		192.668.500	-	-		171.165.433	-	-		88,84 %	-	-
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	59.051.250	45.000.000	-	-	44.846.250	36.122.150	-	-	75,94 %	80,27 %	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.229.500.000	-	-	-	1.969.954.485	-	-	-	88,36 %	-	0,00%	-	-100,00%	-100,00%
Pengembangan Kemitraan informasi dan Komunikasi	164.000.000				127.802.000	-			77,93 %	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	955.000.000				807.921.593	-			84,60 %	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	706.000.000				635.996.405	-			90,08 %	-	-	-	-100,00%	-100,00%
LPPL Radio Magetan Indah	204.500.000				200.847.534	-			98,21 %	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Pengembangan Media Center	200.000.000				197.386.953	-			98,69 %	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	1.287.393.955	-	-	-	1.111.820.658	-	-	-	86,36 %	0,00%	-	-	-
Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	-	47.500.000	-	-	-	38.587.930	-		-	81,24 %	-	-	-	-
Produksi Konten Informasi Publik	-	202.000.000	-	-	-	189.842.420			-	93,98 %	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	79.187.000	-	-	-	57.688.950	-	-	-	72,85 %	-	-	-	-
Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	-	464.231.305	-	-	-	410.356.400	-	-	-	88,39 %	-	-	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	50.000.000	-	-	-	36.365.300	-	-	-	72,73 %	-	-	-	-
Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	-	300.000.000	-	-	-	271.481.108	-	-	-	90,49 %	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyedian dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	-	129.475.650	-	-	-	92.855.250	-	-	-	71,72 %	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	-	15.000.000	-	-	-	14.643.300	-	-	-	97,62 %	-	-	-	-
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	1.282.780.865	2.133.483.155	-	-	1.201.008.452	1.996.707.577	-	-	93,63 %	93,59 %	-	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.282.780.865	2.133.483.155	-	-	1.201.008.452	1.996.707.577	-	-	93,63 %	93,59 %	-	-
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	26.240.250	115.260.750	-	-	26.200.600	109.750.310	-	-	99,85 %	95,22 %	-	-
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	218.820.000	171.459.200	-	-	193.217.250	161.882.500	-	-	88,30 %	94,41 %	-	-
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	310.204.075	329.582.075	-	-	279.083.877	309.946.217	-	-	89,97 %	94,04 %	-	-
Pelayanan Informasi Publik	-	-	30.428.700	38.221.000	-	-	25.132.450	37.768.650	-	-	82,59 %	98,82 %	-	-
Layanannya Hubungan Media	-	-	628.773.700	1.155.824.530	-	-	621.218.175	1.063.207.400	-	-	98,80 %	91,99 %	-	-
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	29.426.650	36.290.600	-	-	23.108.500	33.269.500	-	-	78,53 %	91,68 %	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	38.887.490	286.845.000	-	-	33.047.600	280.883.000	-	-	84,98 %	97,92 %	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	230.000.000	182.100.000	-	-	228.239.810	158.718.700	-	-	99,23 %	87,16 %	0,00%	-	-20,83%	-30,46%
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	75.000.000	52.100.000	-	-	74.966.500	38.763.325			99,96 %	74,40 %	-	-	-30,53%	-48,29%
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	155.000.000	130.000.000	-	-	153.273.310	119.955.375			98,89 %	92,27 %	-	-	-16,13%	-21,74%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	231.450.000	227.116.100	-	-	226.623.165	226.623.165	-	-	97,91 %	99,78 %	-	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	231.450.000	227.116.100	-	-	226.623.165	226.623.165	-	-	97,91 %	99,78 %	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	161.450.000	172.116.100	-	-	158.363.211	168.848.825	-	-	98,09 %	98,10 %	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	70.000.000	55.000.000	-	-	68.259.954	52.121.321	-	-	97,51 %	94,77 %	-	-
Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	-		300.000.000	-	-		297.062.800	-	-	-	99,02 %	-	-
Program Pengembangan Persandian	50.000.000	-	-	-	45.451.740	-	-	-	90,90 %	-	0,00%	-	-100,00%	-100,00%
Penyelenggaraan Persandian	50.000.000	-	-		45.451.740	-			90,90 %	-		-	-100,00%	-100,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	85.000.000	-	-	-	22.520.050	-	-	-	26,49 %	0,00%	-	-	-
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	-	25.000.000	-	-	-	19.649.650	-	-	-	78,60 %	-	-	-	-
Pengembangan Layanan dan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Audit Keamanan Informasi	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	-	10.000.000	-	-	-	2.870.400	-	-	-	28,70 %	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	250.000.000	80.000.000	-	-	244.844.000	78.561.000	-	97,94 %	98,20 %	-	-	-
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000	80.000.000	-	-	244.844.000	78.561.000	-	97,94 %	98,20 %	-	-	-
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	210.000.000	50.000.000	-	-	210.000.000	49.344.700	-	100,00 %	98,69 %	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	40.000.000	30.000.000	-	-	34.844.000	29.216.300	-	-	87,11 %	97,39 %	-	-
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	50.000.000	-	-	-	49.362.563	-	-	-	98,73 %	-	-

Berdasarkan penyajian tabel T-C.24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nomenklatur Program di tahun 2019 sampai 2021 ada beberapa kali perubahan penyusunan sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Sesuai Surat dari Bangda Nomor : 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, maka Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2020 menjadi “**Program Pengelolaan Aplkasi Informatika**”, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di tahun 2020 menjadi ”**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**”.
 - Berdasarkan Surat Nomor : 046/217/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian, maka Program Pengembangan Persandian Tahun 2020 menjadi “**Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**”. Surat Nomor : 120/066/Bangda tanggal 7 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik, tidak ada perubahan program karena sudah sesuai.
 - Penyesuaian program/kegiatan tahun 2021 berpedoman pada Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penghitungan rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran.

2. Realisasi anggaran Tahun 2021 – 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Program dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Program Aplikasi Informatika mencapai rata – rata realisasi 96.08%
 - Program Informasi Dan Komunikasi Publik mencapai rata – rata realisasi 93.61%
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai rata – rata realisasi 98.85%
 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi mencapai rata – rata realisasi 98.07%
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai rata – rata realisasi 86.32%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja dan jenis pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Keinginan masyarakat akan pelayanan informasi publik yang lebih baik, sehingga ketersediaan aplikasi pendukung sangat diperlukan, serta mengembangkan pelayanan informasi publik supaya lebih baik lagi. Layanan informasi Publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yaitu WANI BARES (Melalui Wa, SP4N LAPOR, PPID)
2. Kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, pimpinan dan staf, tentang peran strategis e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Belum ada regulasi terkait pelaksanaan E-Government Kabupaten Magetan Khususnya TIK
4. Pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO) seluruh perangkat daerah Kab. Magetan belum menyeluruh
5. Masih perlunya optimalisasi Data Center Kab. Magetan
6. Peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi
7. Pemahaman SDM terhadap pentingnya keamanan informasi masih terbatas.

b. Peluang

Sedangkan beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Magetan Lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, dan mudah diakses secara cepat dan murah. Seperti Layanan informasi Publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yaitu WANI BARES (Melalui Wa), SP4N LAPOR, PPID . Untuk Layanan tersebut sudah terampu pada Sub kegiatan di Restra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 “Pelayanan Informasi Publik” .
2. Berkembangnya aplikasi open source yang lebih ekonomis, dan semakin banyak aplikasi e-gov yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah lain yang bisa diadopsi.Pada kegiatan tersebut sudah terampu pada Sub kegiatan di Restra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 “Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan rencana anggaran” .
3. Terdapat komitmen dan dukungan kepala daerah tentang penerapan e-government dan pengembangan data statistik sektoral serta melakukan Metadata Statistik Sektoral.
4. Menguatnya kebijakan SPBE secara nasional (adanya Perpres 95/2018) perlu dimanfaatkan Pemerintah Daerah.
5. Pengembangan Aplikasi secara mandiri untuk pelaksanaan SPBE

6. Tersedianya Blue Print untuk pedoman pelaksanaan e-government
7. Tersedianya DRC (Disaster Recovery Center) yang berfungsi untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja.
8. Ketersediaan Data Center
9. Adanya peningkatan kapasitas server untuk colocation aplikasi SPBE

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana (Aset/Modal), anggaran, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2022 serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelaksanaan SPBE masih belum sesuai road map	Belum dapat menyusun peta rencana SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Belum menyusun peraturan tentang arsitektur SPBE Daerah2. Belum ada kebijakan daerah berupa perda/perbup tentang pelaksanaan smart city3. Proses Bisnis di Perangkat Daerah belum dipahami dengan baik oleh Perangkat Daerah sehingga sebagian besar pengembangan Aplikasi masih tidak didasarkan pada proses bisnis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik melalui media online dan media sosial	Pelaksanaan monitoring aspirasi publik masih belum optimal	Belum tersedia tools untuk analisis data monitoring
3	Kurangnya kualitas informasi, konten dan komunikasi publik pada LPPL RMI	Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi informasi pada LPPL RMI	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
4	Belum maksimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	Pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah belum optimal	Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah (PPID)
5	Belum optimalnya pemanfaatan data Statistik Sektoral	Masih belum optimalnya dokumentasi statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman terkait data Statistik Sektoral 2. Terbatasnya SDM Pengelola Data Statistik 3. Belum tersedianya Standar Metadata 4. Kurangnya perhatian dari OPD lain terkait Data Sektoral
6	Belum maksimal Indeks Keamanan Informasi	Belum optimalnya pemenuhan tentang keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya SDM di Bidang Keamanan Informasi 2. Belum optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi 3. Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi 4. Sarana dan prasarana pendukung masih minim

3.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026

Penelaahan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama 3 (tiga) tahun ke depan yaitu tahun 2024 - 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Magetan tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan	1.1. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan kabupaten Magetan 1.2. Meningkatnya realisasi investasi kabupaten Magetan
2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2.3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.1. Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan 3.2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4. Mewujudkan pembangunan yang berdasarkan lingkungan	4.1 Terjaganya keseimbangan ekosistem 4.2 Tercukupinya kebutuhan kawasan perumahan yang layak 4.3 Berkurangnya risiko bencana daerah
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan 5.2 Meningkatnya akuntabilitas dalam manajemen pemerintah 5.3 Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN 5.4 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik 5.5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan selama 3 (tiga) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Fungsi Diskominfo	Tujuan RPD 2024-2025	Sasaran RPD 2024-2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 5. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Tujuan 5 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p>	<p>Sasaran 5.4 : Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</p>

Faktor – faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan antara lain :

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kabupaten Magetan.
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Magetan.
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator pengelolaan keamanan informasi dan penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sedangkan faktor – faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magetan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang belum memadai.
- b. Belum optimalnya koordinasi internal.
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3.4
Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten

No	Tujuan/Sasaran RPD 2024-2025	Tupoksi Diskominfo	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Tujuan 5 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p> <p>Sasaran 5.4 : Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 5. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat menyusun peta rencana SPBE 2. Pelaksanaan monitoring aspirasi publik masih belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi informasi pada LPPL RMI 4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah belum optimal 5. Masih belum optimalnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data 6. Belum optimalnya pemenuhan tentang keamanan informasi 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang belum memadai. b. Belum optimalnya koordinasi internal. c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kabupaten Magetan. c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi

No	Tujuan/Sasaran RPD 2024-2025	Tupoksi Diskominfo	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		statistik sektoral Kabupaten Magetan. d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator pengelolaan keamanan informasi dan penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Magetan.

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung terwujudnya transformasi digital nasional. Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- (1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- (3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services);
- (4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2
Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

No.	KEBIJAKAN RENSTRA K/L	Tupoksi Diskominfo (Perbub 84 Ta. 2021)	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Kementerian Kominfo			
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat menyusun peta rencana SPBE 2. Pelaksanaan monitoring aspirasi publik masih belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi informasi pada LPPL RMI 	Faktor Penghambat : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang belum memadai. b. Belum optimalnya koordinasi internal. c. Pelaksanaan beban kerja
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan			

No.	KEBIJAKAN RENSTRA K/L	Tupoksi Diskominfo (Perbub 84 Ta. 2021)	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	persandian dan bidang statistik; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;	4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah belum optimal 5. Masih belum optimalnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data	yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;	6. Belum optimalnya pemenuhan tentang keamanan informasi	Faktor Pendorong : a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	5. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan		
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal			
	Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional			
1	Meningkatkan operasional secara lincah / agile dalam rangka menghadapi perubahan dinamis			
2	Menjaga stabilitas operasional BSSN			
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.			

No.	KEBIJAKAN RENSTRA K/L	Tupoksi Diskominfo (Perbub 84 Ta. 2021)	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Badan Pusat Statistik			Kabupaten Magetan.
1	Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta			
2	Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data			
3	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM			
4	Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang dan segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengaju pada rencana tata ruang yang berlaku.

Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032. Dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan itu sendiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya, rencana fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri.

Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan efisiensi posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang.

Selanjutnya adalah wilayah Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana yang termasuk wilayahnya yaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec. Kartoharjo, Kec. Karas, Kec. Sukomomro, Kec. Bendo, Kec. Takeran, Kec. Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo.

Untuk rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan selama 3 (tiga) tahun yang akan datang (2024 – 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan – kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Magetan.

3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya. Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergi partisipatif dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik.
2. Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai dan belum terbentuknya metadata statistik sektoral.
3. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
 - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian
 - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis

- Belum adanya kolaborasi yang harmonis antar Perangkat daerah dan sinergitas peraturan dalam manajemen SPBE
 - Pengembangan aplikasi yang belum berdasarkan proses bisnis.
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi , khususnya website pemerintah daerah.
 5. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.
 6. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika serta target yang ditetapkan setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C. 25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	2,7	2,7
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik		Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	80%	81%	82%
			Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	90%	92%	95%
	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas		Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	86%	87%	88%
	Meningkatnya keamanan informasi daerah		Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	28%	29%	30%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	82%	82,1%	82,2 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan selama 3 (tiga) tahun ke depan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi. sistem manajemen. dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel T-C.26.
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government
				1.1.2	Meningkatkan Informasi dan pengelolaan komunikasi publik	1.1.1.2	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif dalam bentuk penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi
		2.2	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	2.2.1	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data	2.2.2.1	Mengoptimalkan Pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya

Tujuan	Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
	3.3	Meningkatnya keamanan informasi daerah	3.3.1	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Kab. Magetan	3.3.3. 1	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan. Pada Bab berikut ini kami sajikan Program Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini :

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II Angka	2,27	2,6	2.055.300.000	2,7	4.235.000.000	2,7	4.685.000.000	2,7	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Percentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan II %	0	50	2.055.300.000	55	4.235.000.000	60	4.685.000.000	60	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Percentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan II %	0	50	2.055.300.000	55	4.235.000.000	60	4.685.000.000	60	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	6	15	1.430.000.000	15	1.800.000.000	10	2.000.000.000	40	5.230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 3.2.01. 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ll unit	0	15	1.430.000.000	15	1.800.000.000	10	2.000.000.000	40	5.230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE ll Dokumen	1	1	625.300.000	1	2.435.000.000	1	2.685.000.000	3	5.745.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	1 dokumen	59.800.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	3	459.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola ll unit	1	1	260.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	1	1.660.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan ll Unit	0	50	180.000.000	55	650.000.000	60	750.000.000	60	1.580.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City ll Dokumen	0	1 dokumen	39.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	3	339.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 3.2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah ll Dokumen	0	2 dokumen	45.500.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	750.000.000	6	1.495.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) ll Dokumen	0	1 dokumen	26.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	3	146.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyeleenggaraan SPBE ll Dokumen	1	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	3	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatkan Keterpaduan Penyeleenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ll Angka	2,27	2,6	2.055.300.000	2,7	4.235.000.000	2,7	4.685.000.000	2,7	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City ll %	0	80	2.055.300.000	81	4.235.000.000	82	4.685.000.000	82	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Percentase aplikasi yang dibuat, dipelihara, atau pun dikembangkan ll %	0	50	2.055.300.000	55	4.235.000.000	60	4.685.000.000	60	10.975.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO II OPD	6	15	1.430.000.000	15	1.800.000.000	10	2.000.000.000	40	5.230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.01. 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah II unit	0	15	1.430.000.000	15	1.800.000.000	10	2.000.000.000	40	5.230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.00 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE II Dokumen	1	1	625.300.000	1	2.435.000.000	1	2.685.000.000	3	5.745.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota II Dokumen	0	1	59.800.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	459.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola II unit	1	1	260.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	3	1.660.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan II Unit	0	50	180.000.000	55	600.000.000	60	650.000.000	165	1.430.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 3.2.02. 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City ll Dokumen	0	1	39.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	339.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah ll Dokumen	0	2	45.500.000	2	600.000.000	2	650.000.000	6	1.295.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) ll Dokumen	0	1	26.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	146.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.2.02. 0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE ll Dokumen	1	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 3.3.02. 0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital ll Orang	0	0	0	150	150.000.000	200	200.000.000	350	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik				Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi ll %	0	90	1.262.531.270	92	2.390.000.000	95	2.555.000.000	95	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi ll %	0	90	1.262.531.270	92	2.390.000.000	95	2.555.000.000	95	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media ll Berita	0	1.200	1.262.531.270	1.500	2.390.000.000	1.700	2.555.000.000	4.400	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ll Dokumen	0	3	65.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	9	340.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah ll Dokumen	0	1	19.500.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	64.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ll Dokumen	0	12	65.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	36	490.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ll Dokumen	0	2	260.000.000	2	350.000.000	2	375.000.000	6	985.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik ll Dokumen	0	4	65.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	12	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media II Layanan	0	8	677.531.270	8	1.250.000.000	8	1.300.000.000	24	3.227.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya ll Orang	0	45	58.500.000	45	45.000.000	45	50.000.000	135	153.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan ll Komunitas	0	2	52.000.000	2	325.000.000	2	350.000.000	6	727.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik			Percentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat ll %	0	90	1.262.531.270	92	2.390.000.000	95	2.555.000.000	95	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Publik Dalam Desiminasi Informasi ll %	0	90	1.262.531.270	92	2.390.000.000	95	2.555.000.000	95	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang di sampaikan melalui Media II Berita	0	1.200	1.262.531.270	1.500	2.390.000.000	1.700	2.555.000.000	4.400	6.207.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 2.2.01. 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ll Dokumen	0	3	65.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	9	340.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah ll Dokumen	0	1	19.500.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	64.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik ll Dokumen	0	12	65.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	36	490.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ll Dokumen	0	2	260.000.000	2	350.000.000	2	375.000.000	6	985.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik ll Dokumen	0	4	65.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	12	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media ll Layanan	0	8	677.531.270	8	1.250.000.000	8	1.300.000.000	24	3.227.531.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 2.2.01. 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya ll Orang	0	45	58.500.000	45	45.000.000	45	50.000.000	135	153.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 2.2.01. 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakanll Komunitas	0	2	52.000.000	2	325.000.000	2	350.000.000	6	727.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten				Cakupan ketersediaan data statistik sektoral ll %	85,19	86	359.385.000	87	1.105.000.000	88	1.170.000.000	88	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Percentase data yang di olah dan disajikan ll %	0	50	359.385.000	55	1.105.000.000	60	1.170.000.000	60	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase data yang di olah dan disajikan ll %	0	50	359.385.000	55	1.105.000.000	60	1.170.000.000	60	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
		2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan ll Dokumen	3	3	359.385.000	3	1.105.000.000	3	1.170.000.000	6	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.20.0 2.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral II Dokumen	0	3	209.885.000	3	230.000.000	3	250.000.000	9	689.885.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS II orang	0	27	71.500.000	27	200.000.000	27	220.000.000	81	491.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi II Orang	0	5	26.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	15	201.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun II Dokumen	0	1	26.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	626.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik II Dokumen	0	1	26.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	626.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas			Cakupan ketersediaan data statistik sektoral II %	85,19	86	359.385.000	87	1.105.000.000	88	1.170.000.000	88	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang diolah dan disajikan II %	0	50	359.385.000	55	1.105.000.000	60	1.170.000.000	60	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan ll Dokumen	3	3	359.385.000	3	1.105.000.000	3	1.170.000.000	6	2.634.385.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral ll Dokumen	0	3	209.885.000	3	230.000.000	3	250.000.000	9	689.885.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS ll orang	0	27	71.500.000	27	200.000.000	27	220.000.000	81	491.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi ll Orang	0	5	26.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	15	201.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun ll Dokumen	0	1	26.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	626.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.20.0 2.2.01. 0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik ll Dokumen	0	1	26.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	626.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				Percentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi ll %	27,78	28	98.271.800	29	560.000.000	30	650.000.000	30	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya keamanan informasi daerah			Percentase pengamanan Informasi pada Aplikasi ll %	0	60	98.271.800	65	560.000.000	70	650.000.000	70	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Percentase pengamanan Informasi pada Aplikasi ll %	0	60	98.271.800	65	560.000.000	70	650.000.000	70	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ll OPD	54	46	98.271.800	46	560.000.000	46	650.000.000	54	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan ll Dokumen	1	1	32.500.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	482.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ll Laporan	0	1	13.771.800	1	110.000.000	1	125.000.000	3	248.771.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.21.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik II Laporan	0	1	39.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	3	329.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2.2.01. 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi II OPD	54	46	13.000.000	46	110.000.000	46	125.000.000	138	248.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya keamanan informasi daerah			Percentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi II %	27,78	28	98.271.800	29	560.000.000	30	650.000.000	30	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Percentase pengamanan Informasi pada Aplikasi II %	0	60	98.271.800	65	560.000.000	70	650.000.000	70	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah II OPD	54	46	98.271.800	46	560.000.000	46	650.000.000	54	1.308.271.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2.2.01. 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan II Dokumen	1	1	32.500.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	482.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.21.0 2.2.01. 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ll Laporan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ll Laporan	0	1	13.771.800	1	110.000.000	1	125.000.000	3	248.771.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2.2.01. 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik II Laporan	0	1	39.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	3	329.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.0 2.2.01. 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi ll OPD	54	46	13.000.000	46	110.000.000	46	125.000.000	138	248.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	81.94	82	4.839.380.000	82,1	6.069.593.069	82,2	6.189.593.069	82,2	17.098.566.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	81.94	82	4.839.380.000	82,1	6.069.593.069	82,2	6.189.593.069	82,2	17.098.566.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika ll (Angka)	0	80	4.839.380.000	80,1	6.069.593.069	80,2	6.189.593.069	80,2	17.098.566.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	7	14	32.500.000	14	55.000.000	14	55.000.000	42	142.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ll Dokumen	5	8	19.500.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	79.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ll Laporan	2	8	13.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	24	63.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	0	91	2.503.900.000	92	3.300.593.069	93	3.300.593.069	93	9.105.086.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ll Orang/bulan	0	40	2.502.600.000	40	3.299.593.069	40	3.299.593.069	120	9.101.786.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ll Dokumen	0	1	1.300.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	0	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ll Orang	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	120	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	120	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	0	12	356.770.000	12	639.000.000	12	699.000.000	36	1.694.770.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan II Paket	0	4	14.270.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12	74.270.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor II Paket	0	12	134.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	36	784.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan II Paket	0	2	6.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	46.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan II Paket	0	3	34.450.000	3	40.000.000	3	40.000.000	9	114.450.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan II Paket	0	3	13.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	9	63.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan II Dokumen	0	2	4.550.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan	0	12	150.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	36	600.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan 11 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	0	12	1.636.000.000	12	1.610.000.000	12	1.670.000.000	36	4.916.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan	0	12	260.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	36	690.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Laporan	0	4	26.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	12	116.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan	0	12	1.350.000.000	12	1.360.000.000	12	1.400.000.000	36	4.110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	0	16	210.210.000	16	365.000.000	16	365.000.000	16	940.210.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ll Unit	0	1	47.710.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	137.710.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ll Unit	0	14	97.500.000	14	70.000.000	14	70.000.000	42	237.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ll Unit	0	1	65.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	565.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika ll (Angka)	81.94	82	4.839.380.000	82,1	5.799.593.069	82,2	5.889.593.069	82,2	16.528.566.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika ll (Angka)	0	80	4.839.380.000	80,1	5.799.593.069	80,2	5.889.593.069	80,2	16.528.566.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	7	14	32.500.000	14	55.000.000	14	55.000.000	42	142.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ll Dokumen	5	8	19.500.000	8	30.000.000	8	30.000.000	24	79.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ll Laporan	2	8	13.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	24	63.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	0	91	2.503.900.000	92	3.180.593.069	93	3.200.593.069	93	8.885.086.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ll Orang/bulan	0	40	2.502.600.000	40	3.179.593.069	40	3.199.593.069	120	8.881.786.138	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ll Dokumen	0	1	1.300.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaiyan sesuai Prosedur Orang	0	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ll Orang	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	120	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	120	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0016	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	0	12	356.770.000	12	539.000.000	12	589.000.000	36	1.484.770.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
		2.16.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ll Paket	0	4	14.270.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12	74.270.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor ll Paket	0	12	134.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	36	584.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ll Paket	0	2	6.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	46.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ll Paket	0	3	34.450.000	3	40.000.000	3	40.000.000	9	114.450.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ll Paket	0	3	13.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	9	63.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ll Dokumen	0	2	4.550.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.550.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan	0	12	150.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	36	590.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08. 0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	0	12	1.636.000.000	12	1.610.000.000	12	1.630.000.000	36	4.876.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan	0	12	260.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	36	690.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan	0	4	26.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	12	116.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan	0	12	1.350.000.000	12	1.360.000.000	12	1.360.000.000	36	4.070.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit	0	16	210.210.000	16	315.000.000	16	315.000.000	16	840.210.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya II Unit	0	1	47.710.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	137.710.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
		2.16.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya ll Unit	0	14	97.500.000	14	70.000.000	14	70.000.000	42	237.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ll Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ll Unit	0	1	65.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	465.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
JUMLAH							8.614.868.070		14.089.593.069		14.949.593.069		37.654.054.208		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026		
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,27	2,6	2,7	2,7	2,7	
	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	0	80%	81%	82%	82%	
	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	0	90%	92%	95%	95%	
2	Urusan Statistik						
	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	85,19	86%	87%	88%	88%	
3	Urusan Persandian						
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	27,78	28%	29%	30%	30%	

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, akan tetapi mengalami perubahan di bidang urusan Persandian dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan Tata kelola SPBE dan Smart City}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$
		Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi Yang disampaikan}}{\text{jumlah masyarakat yang disurvei}} \times 100\%$
2	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah mengintregasikan Data Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$
3	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD Kab. Magetan}} \times 100$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan Pedoman dan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :

A. PEDOMAN

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja) untuk tahun 2024 hingga tahun 2026.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Agustus 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

CANAYA WIJAYA, S.S.TP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760520 199511 1 001